



**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018**

**NOMOR : Renja/05/VII/2017  
TANGGAL : 10 Juli 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD.

Dengan selesainya Dokumen RENJA ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen ini.

Meureudu, Juni 2017

**Kepala Bappeda  
Kabupaten Pidie Jaya**

**Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670509 198902 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2011</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda .....	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....	21
2.3. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN dan PROGRAM KEGIATAN</b> .....	30
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda .....	30
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2015 .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau sebutan lain Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Sementara dalam penyusunan RKPK, sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sebutan lain Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) membuat dan memiliki Renja SKPK, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPK dan mengacu kepada RKPK, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPK.

Rencanan Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Pidie Jaya untuk Tahun 2018. Renja SKPK ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPK, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja SKPK didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum dan rujukannya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan rencana kerja Bappeda dimaksud untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi arah pembangunan sehingga berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan adanya sinkronisasi dengan RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

*RENCANA KERJA BAPPEDA KAB. PIDIE JAYA TAHUN 2018*

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Disamping itu menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPK adalah sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan daerah berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Pidie Jaya untuk tahun 2018 dengan menetapkan kebijakan anggaran, strategi pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan umum serta menjadi dokumen perencanaan tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan rencana kerja Bappeda Pidie Jaya Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana rencana kerja tersebut disusun menurut sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*sustainable development goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal**

Pada subbagian ini menguraikan terhadap hasil yang telah dicapai oleh SKPK berdasarkan rancangan awal RKPK dan membandingkan dengan hasil yang ada pada RKPK dengan analisis kebutuhan, menjelaskan proses dan temuan-temuan tentang program kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPK dan alasan-alasannya.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,



asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPK**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPK

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPK, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda**

Bappeda Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2016 telah melaksanakan 8 (delapan) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 3 (tiga) program yang sifatnya *supporting* terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis :

**1. Program Perencanaan Tata Ruang** dengan anggaran sebesar Rp.29.750.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 29,666,000,- atau 99,72%. Indikator programnya adalah Tingkat ketersediaan dokumen RTRW dan Sosialisasi. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi fisik dibandingkan target adalah 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**a. Pengendalian tata ruang**, Indikator Output kegiatannya adalah terselenggaranya institusi pengendalian ruang secara efektif. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 29.666.000.- atau 99,72 %. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi fisik kegiatan adalah 100 %.

**2. Program Pengembangan Data/Informasi** dengan anggaran sebesar Rp. 489.991.294.- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 479.824.686 atau 98,71 %. Indikator programnya Meningkatkan ketersediaan dokumen/informasi. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**a. Operasional Geographical Information System (GIS)**. Indikator Output kegiatannya adalah jumlah database spasial yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

- b. **Operasional Pusat Data/Informasi (Pusdatin) Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.** Indikator Output kegiatannya adalah. Indikator Output kegiatannya adalah jumlah data yang terkumpul pada pusat data bappeda. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- c. **Penyusunan Profil Kabupaten Pidie Jaya.** Indikator Output kegiatannya adalah jumlah buku pengembangan data base pembangunan daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- d. **Pengembangan Database Pembangunan Daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah jumlah buku pengembangan data base pembangunan daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- e. **Publikasi Data/Informasi Pembangunan Daerah Melalui Teknologi Informasi.** Indikator Output kegiatannya adalah jumlah data yang terkumpul pada pusat data bappeda. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- f. **Publikasi Data Statistik Daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah data statistik daerah yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

**4. Program Kerjasama Pembangunan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.631.200.000, proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 2.531.549.300,- atau 96,21%. Indikator programnya adalah Meningkatnya kerjasama pembangunan antar level pemerintahan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. **Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Khusus.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah rapat koordinasi dana outsus/migas dengan SKPK/SKPA pengelola

dana otonomi khusus yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

- b. **Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi percepatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- c. **Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Regional Manajemen.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah koordinasi dan kerja sama dengan daerah kegiatan RM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- d. **Penyusunan Perkembangan Pembangunan Daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah tersediannya informasi tentang perkembangan pembangunan daerah selama 5 tahun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

**5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.** dengan anggaran sebesar Rp. 1.276.830.000, proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.263.884.187,- atau 98,99%. Indikator programnya adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. **Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan kabupaten Pidie Jaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- b. **Pembinaan perkuatan sumber daya air.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah peserta P3A yang dibina. Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

- c. **Operasional Pelaksanaan Program percepatan sanitasi permukiman (PPSP) dan air minum dan AMPL.** Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya percepatan sanitasi permukiman (PPSP) dan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- d. **Peningkatan kemampuan teknis penguasaan teknologi dan informasi aparat perencana.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah aparatur daerah yang dilatih menggunakan software ArcGIS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- e. **Penyusunan Rancangan RPJPD.** Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya rancangan dokumen RPJPD Pidie Jaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

**6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.** dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.219.456,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.892.818.844,- atau 99.61%. Indikator programnya Tersediannya dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. **Penyusunan rancangan RKPD.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen RKPK yang tersusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- b. **Penyelenggaraan musrenbang RKPD.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Musrenbang yang Terlaksana.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

- d. **Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah jumlah buku dokumen hasil monitoring pembangunan daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- e. **Penyusunan RKT.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen RKT yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- f. **Penyusunan KU-APBK.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen KU-APBK yang Tersusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- g. **Penyusunan PPAS.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen PPAS yang Tersusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- h. **Penyusunan PPAS Perubahan.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen PPAS-P yang Tersusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- i. **Penyusunan KU-APBK Perubahan.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen KUA-P yang Tersusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- j. **Penyusunan dokumen rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM).** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen RP2IJM direview. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

- k. **Evaluasi RPJMD Pidie Jaya.** Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya evaluasi terhadap Dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- l. **Perencanaan Wilayah Terpadu Jangka Menengah.** Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya dokumen perencanaan terpadu jangka menengah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- m. **Koordinasi Transparansi dan Percepatan Realisasi Anggaran.** Indikator Output kegiatannya adalah Tersediannya dokumen evaluasi serta pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

**7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.** dengan anggaran sebesar Rp. 364.800.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 354.803.300,- atau 97,26%. Indikator programnya adalah Tingkat ketersediaan dokumen rencana bidang ekonomi. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. **Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah Buku yang tersusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- b. **Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.** Indikator Output kegiatannya adalah Tingkat Koordinasi Ekonomi yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- c. **Promosi potensi pembangunan ekonomi daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah buku peluang investasi,

Jumlah Brosur, Jumlah Poster. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

**8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.** dengan anggaran sebesar Rp. 347.475.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 342.751.774,- atau 98,64%. Indikator programnya adalah Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan KSDM. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. **Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah rapat koordinas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- b. **Koordinasi penyusunan strategis penanggulangan kemiskinan daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah rapat koordinas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- c. **Fasilitasi Percepatan Pembangunan Gampong.** Indikator Output kegiatannya adalah Prosentase fasilitasi percepatan pembangunan gampong. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
- d. **Penyusunan Indikator Pendidikan Daerah.** Indikator Output kegiatannya adalah Tersusunnya dokumen indikator Pendidikan Kab. Pidie Jaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.

**9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.** dengan anggaran sebesar Rp. 446.530.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 437.840.203,- atau 98,05%. Indikator



programnya adalah Tingkat pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan Sarana dan Prasarana. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana**

**Wilayah dan Sumber Daya Alam**, Indikator Output kegiatannya adalah Jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 96 %.

**b. Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis**

**Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)**. Indikator Output kegiatannya adalah Pemanfaatan Lahan kritis menjadi lahan produktif. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

Hasil Analisis pencapaian kinerja 11 program yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) adalah sebesar 94,86 %.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (tahun n-3) Renstra Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan**  
**Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2016**  
**Kabupaten Pidie Jaya**

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra Bappeda Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015			Target program/ kegiatan Renja Bappeda tahun 2016	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Bappeda s/d 2016	
					Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Capaian (%)		Realisasi capaian tahun 2016	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN WAJIB									
1,06	BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1.05.1.06.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tingkat ketersediaan dokumen RTRW dan Sosialisasi	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.05.1.06.01.00.15.04	SOSIALISASI QANUN TATA RUANG	Terlaksananya sosialisasi Qanun Tataruang Kabupaten Pidie Jaya	100%	0%	-	20%	100%	-	-	-
1.06.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.06.01.00.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional perkantoran	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik untuk operasional kantor	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk operasional kantor	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	-	-	-
1.06.01.00.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	Terpenuhinya keperluan jasa administrasi keuangan	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Tersedianya ATK yang memadai untuk operasional perkantoran	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra Bappeda Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015			Target program/ kegiatan Renja Bappeda tahun 2016	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Bappeda s/d 2016	
					Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Capaian (%)		Realisasi capaian tahun 2016	Tingkat capaian (%)
1.06.01.00.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya referensi buku dan perundang-undangan	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur pemerintahan	60 Bln	0 Bln	12 Bln	11 Bln	92%	12 Bln	11 Bln	92%
1.06.01.00.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.01.20	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	60 Bln	0 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.06.01.00.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	tersediannya Perlengkapan gedung Kantor	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.00.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	terpeliharanya gedung kantor	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	terpenuhinya kapasitas sumberdaya aparatur	67%	0%	13%	13%	100%	13%	20%	100%
1.06.01.00.05.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia	20 Kali	0 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	3 Kali	75%
1.06.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Jumlah data dan Informasi yang tersedia	78%	0%	16%	16%	100%	15%	14%	93%
1.06.01.00.15.06	OPERASIONAL GEOGRAFIS INFORMASI SISTEM ( GIS )	Jumlah database spasial yang tersedia	100%	0%	100%	100%	100%	100%	90%	90%
1.06.01.00.15.14	OPERASIONAL PUSAT DATA/INFORMASI (PUSDATIN) BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA	jumlah data yang terkumpul pada pusat data bappeda	100%	0%	100%	100%	100%	100%	95%	100%
1.06.01.00.15.16	PENGEMBANGAN DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah buku pengembangan data base pembangunan daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.00.15.17	PUBLIKASI DATA / INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI/ WEBSITE	Jumlah publikasi pembangunan daerah melalui website	100%	0%	100%	100%	100%	100%	95%	95%
1.06.01.00.15.18	PUBLIKASI DATA STATISTIK DAERAH	Jumlah data statistik daerah yang tersedia	90 Dok	0	18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	18 Dok	100%
1.06.01.00.16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Jumlah Kerja sama pembangunan yang terjalin	80%	0%	20%	16%	100%	20%	20%	100%

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra Bappeda Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015			Target program/ kegiatan Renja Bappeda tahun 2016	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Bappeda s/d 2016	
					Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Capaian (%)		Realisasi capaian tahun 2016	Tingkat capaian (%)
1.06.01.00.16.07	KOORDNASI PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAN PENGEMBANGAN KHUSUS	Jumlah rapat koordinasi dana outsus/migas dengan SKPK/SKPA pengelola dana otonomi khusus yang dilaksanakan	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.06.01.00.16.08	KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi percepatan	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.06.01.00.16.12	FASILITAS KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL MANAJEMEN	Jumlah koordinasi dan kerja sama dengan daerah kegiatan RM	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.06.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Aparatur yg dilatih, P3A yg dibina, Jumlah Kajian diBuat, dan penguatan PPSP/AMPL	68%	0%	14%	14%	100%	13%	13%	100%
1.06.01.00.20.05	PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR	Jumlah peserta P3A yang dibina	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
1.06.01.00.20.06	OPERASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) DAN AIR MINUM DAN AMPL	terlaksananya percepatan sanitasi permukiman (PPSP) dan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	100%	0%	20%	20%	100%	20%	18%	90%
1.06.01.00.20.07	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI APARAT PERENCANA	Jumlah aparatur daerah yang dilatih menggunakan software ArcGIS	5 kali	0 Kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
1.06.01.00.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terencananya pembangunan daerah	66%	0%	13%	13%	100%	14%	14%	100%
1.06.01.00.21.08	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	Jumlah buku dokumen RKPD yang tersedia	5 dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.21.09	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta yang dilaksanakan	5 kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
1.06.01.00.21.13	MONITORING; EVALUASI; PENGENDALIAN; DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah buku dokumen hasil monitoring pembangunan daerah	30 Dok	0 Dok	7 Dok	7 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
1.06.01.00.21.14	PENYUSUNAN RKT	Jumlah buku dokumen RKT yang tersedia	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.21.15	PENYUSUNAN KU-APBK	Jumlah buku dokumen KU-APBK yang tersedia	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra Bappeda Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015			Target program/ kegiatan Renja Bappeda tahun 2016	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Bappeda s/d 2016	
					Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Capaian (%)		Realisasi capaian tahun 2016	Tingkat capaian (%)
1.06.01.00.21.17	PENYUSUNAN PPAS	Jumlah buku dokumen PPAS yang tersedia	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.21.19	PENYUSUNAN PPAS PERUBAHAN	Jumlah buku dokumen PPAS Perubahan yang tersedia	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.21.20	PENYUSUNAN KU-APBK PERUBAHAN	Jumlah buku dokumen KU-APBK Perubahan yang tersedia	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.21.21	PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TERPADU dan PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM)	Jumlah Dokumen RP2IJMD yg direview	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.21.26	SOSIALISASI RPJMK PIDIE JAYA 2014-2019	Prosentase sosialisasi yang dilaksanakan	100%	0%	20%	20%	100%	-	-	-
1.06.01.00.21.28	PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU JANGKA MENENGAH	Perosentase Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	100%	0%	20%	20%	100%	20%	18%	90%
1.06.01.00.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan ekonomi	60%	0%	12%	12%	100%	12%	10%	83%
1.06.01.00.22.02	PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH	Jumlah Buku PDRB	10 Dok	0 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	-	-	-
1.06.01.00.22.03	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	Jumlah RAD yang tersusun	7 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.06.01.00.22.04	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	Jumlah Pertemuan koordinasi perencanaan pembangunan bidang	100%	0%	20%	20%	100%	20%	19%	95%
1.06.01.00.22.12	PROMOSI POTENSI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	Jumlah buku peluang investasi, Jumlah Brosur, Jumlah Poster	9 kali	0 Kali	2 kali	2 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
1.06.01.00.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan KSDM	70%	0%	14%	14%	100%	14%	14%	100%
1.06.01.00.23.03	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah rapat koordinas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.00.23.08	KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	Jumlah buku dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra Bappeda Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015			Target program/kegiatan Renja Bappeda tahun 2016	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Bappeda s/d 2016	
					Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Capaian (%)		Realisasi capaian tahun 2016	Tingkat capaian (%)
1.06.01.00.23.11	KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM MDGS	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian MDG's Pidie Jaya	100%	0%	100%	100%	100%	-	-	-
1.06.01.00.23.12	FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN GAMPONG	Prosentase fasilitasi percepatan pembangunan gampong	100%	0%	100%	100%	100%	100%	95%	95%
1.06.01.00.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan Sarana dan Prasarana	65%	0%	13%	13%	95%	13%	13%	100%
1.06.01.00.24.04	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBAGUNAN BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA	Jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya yang dilaksanakan	65%	0%	13%	13%	96%	13%	12%	92%
1.06.01.00.24.05	PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT (PLKSDA-BM)	Pemanfaatan Lahan kritis menjadi lahan produktif	65%	0%	13%	13%	100%	13%	13%	100%



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2016**

Bappeda Kabupaten Pidie Jaya di Tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 11.500.949.384,- dengan belanja tidak langsung Rp. 2.360.110.759 dan Belanja Langsung Rp. 9.140.838.625 dengan 11 program dan 52 kegiatan. Dari jumlah dana belanja langsung tersebut, terealisasi sebesar Rp. 8.925.923.117,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,65%.

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017**

Untuk tahun Anggaran 2017, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya sudah mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp. 8.988.643.700,- terurai dalam 13 program dan 53 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;



- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui sistem absensi elektronik;
  - c. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan;

- d. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal; dan
  - e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien;
    - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan
    - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
  3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
  4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya;
    - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.

5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
  - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

### **2.3. Isu-Isu Strategi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

#### **A. Permasalahan Perencanaan**

1. Belum terlaksananya Musrenbang desa secara efektif dan efisien
2. Belum adanya SDM Perencanaan di tingkat gampong, Kecamatan dan SKPD yang berkualitas
3. Rendahnya partisipasi stakeholder dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Apriori para stakeholder terhadap pelaksanaan musrenbang yang hanya bersifat formalitas semata.
5. Terbatasnya anggaran untuk mengadopsi semua keinginan rakyat.

#### **Strategi Pemecahan**

Dalam rangka menuntaskan Masalah di atas, maka strategi pembangunan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terlaksananya Musrenbang desa dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kecamatan, serta melakukan kerjasama dengan Aparatur desa agar tidak terjadi timpang tindihnya pembangunan disebabkan adanya alokasi dana untuk desa.
2. Mendorong terlaksananya Musrenbang kecamatan.
3. Menyelenggarakan Musrenbang kabupaten secara tepat waktu.
4. Meningkatkan kapasitas SDM perencana dari tingkat gampong, kecamatan dan SKPK.

5. Mensosialisasikan UU No 25 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2008 dan Permendagri 54/2010.
6. Berupaya meningkatkan anggaran pada setiap kegiatan Musrenbang.

## **B. Permasalahan Koordinasi**

Koordinasi adalah suatu proses persamaan persepsi terhadap sesuatu persoalan atau pembahasan sehingga memperoleh sebuah kesepakatan positif sebagai solusi yang tepat. Koordinasi ini dapat dilakukan dalam bentuk rapat-rapat atau pertemuan yang terjadwal baik dalam waktu mingguan, bulanan ataupun tahunan serta dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan (eksidental).

Sebagai salah satu fungsi tupoksi Bappeda, Kegiatan koordinasi perencanaan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal adalah kegiatan koordinasi yang dilakukan antar bidang, kasub.bidang di Bappeda. Sedangkan koordinasi eksternal adalah kegiatan koordinasi yang dilakukan antara Bappeda dengan SKPD dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perencanaan.

Beberapa masalah yang terjadi dalam proses koordinasi perencanaan pembangunan yaitu:

1. Tidak adanya jadwal/schedule koordinasi tahunan di Bappeda.
2. Belum adanya ketetapan waktu pertemuan koordinasi bulanan baik untuk koordinasi internal maupun external.
3. Belum terwujudnya koordinasi antar Tim TAPD, Bappeda dan SKPD serta DPRD secara efektif dan efisien.
4. Belum tersusunnya laporan hasil koordinasi dalam berita acara setiap pertemuan.
5. Belum terlaksananya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil koordinasi secara efektif dan efisien.
6. Belum terevaluasinya hasil koordinasi dilaksanakan per triwulan.

## **Strategi**

Untuk melaksanakan dan memecahkan persoalan kesenjangan dalam koordinasi perencanaan dapat dilakukan melalui strategi berikut:

1. Menyusun kalender kegiatan koordinasi.
2. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah kabupaten.
3. Menyusun laporan hasil koordinasi perencanaan.
4. Melaksanakan rencana tindak lanjut hasil koordinasi.

## **C. Permasalahan Sumber Daya Manusia**

Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di Bappeda Pidie Jaya diantaranya:

- Belum terpenuhinya staf perencanaan yang berkualitas, dan yang menempuh pendidikan S-2 sesuai dengan latar belakang ilmu yang dibutuhkan Bappeda.
- Belum terwujudnya kedisiplinan dan terbatasnya pengetahuan perencanaan, sehingga staf Bappeda belum merasa bertanggung jawab terhadap sebuah proses perencanaan.

## **Strategi**

Dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bekerja maka perlu dipersiapkan tenaga yang trampil dan kualifikasi pendidikan yang memadai. Bappeda kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2016 telah mengusulkan kepada kepala daerah untuk menambah pegawai khususnya yang berpendidikan S-2 bidang perencanaan guna meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang. Di samping itu terus memberikan ruang untuk mengikuti Bimtek perencanaan baik yang dilakukan Bappeda Pidie Jaya sendiri ataupun yang dilakukan oleh lembaga lain. Bappeda juga terus meningkatkan kedisiplinan terhadap PNS di lingkungannya.

#### **D. Permasalahan Sarana dan Fasilitas Pendukung**

Data inventaris di atas menunjukkan bahwa hampir semua sarana dan prasarana penunjang perkantoran di Bappeda Pidie Jaya belum memenuhi kebutuhan yang ideal dan bahkan masih banyak sarana dan prasarana yang belum ada sama sekali. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum memadainya sarana dan prasarana perkantoran diantaranya adalah :

1. Anggaran dana untuk sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga belum mampu untuk mewujudkan semua prasarana kantor yang ideal.
2. Manajemen inventarisasi barang yang kurang baik sehingga menyebabkan sering terhambatnya operasional kerja.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten yang memahami teknologi Informasi dengan baik.

#### **Strategis**

Untuk mengatasi persoalan di atas perlu adanya langkah-langkah tindak lanjut diantaranya :

1. Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk menambah anggaran Bappeda khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor.
2. Perlunya penguatan kapasitas manajemen perkantoran khususnya bagian inventarisasi barang atau bendara pemegang barang.

#### **E. Permasalahan Pengendalian dan Evaluasi**

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diinginkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi koordinasi masih lemah karena SKPD masih berjalan sendiri-sendiri.
2. Belum tegasnya pelaksanaan tupoksi masing-masing SKPD, sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan antar SKPD.
3. Kegiatan pengendalian dan monitoring tidak berjalan optimal karena proses pengendaliannya yang rendah.

4. Kedisiplinan penyampaian laporan kegiatan SKPD masih rendah. Banyak SKPD yang melaporkan laporan realisasi yang tidak tepat waktu (terlambat).
5. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan kerap kali tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran.

### **Strategi**

Dengan memperhatikan gap yang terjadi dari kondisi saat ini maka strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Memaksimalkan peran dan fungsi koordinasi pertemuan rutin setiap triwulan.
2. mengevaluasi dan mempertegas uraian tupoksi setiap SKPD melalui keputusan Bupati.
3. Menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengendalian dan monitoring.
4. Memberikan sanksi kepada SKPD yang tidak menyerahkan laporan tepat waktu.
5. Kegiatan pemantauan di lapangan dilakukan secara berkala.
6. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala tentang cara pengendalian kegiatan.

### **F. Permasalahan Evaluasi Pembangunan**

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diinginkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan evaluasi sebagai berikut :

1. Pembangunan banyak yang tidak tepat sasaran.
2. Kegiatan evaluasi pembangunan tidak dapat terlaksana secara optimal.
3. Kurangnya peningkatan SDM dibidang evaluasi program pembangunan.
4. Munculnya berbagai pola evaluasi yang beraneka ragam.
5. Dokumen hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh SKPD.

## **Strategi**

Dengan memperhatikan gap yang terjadi dari kondisi saat ini maka strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala dan berkelanjutan.
2. Hasil evaluasi dijadikan sebagai input untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan datang.
3. Ikut serta dalam berbagai pelatihan tentang tata cara evaluasi.
4. Membuat standar baku pelaporan hasil evaluasi.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 diperoleh kesimpulan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan prioritas Bappeda Pidie Jaya untuk Tahun Anggaran 2017 telah diakomodir dalam RKPK 2017 beserta besaran anggarannya.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga *perencana, koordinasi, serta evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan*. Sebagai lembaga teknis daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini membantu Bupati Pidie Jaya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014-2019. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya adalah : **“Menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan Perencanaan yang lebih berkualitas.”**

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Misinya sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.
2. Melaksanakan penatausahaan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang akuntabel.

3. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat.
4. Melaksanakan kajian/studi pembangunan secara analitis dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai kebutuhan.
5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu.
6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SKPD harus memperhatikan kerangka kegiatan untuk terlaksananya program yang ditetapkan. Adapun kerangka kegiatan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya adalah :

1. Meningkatkan kualitas system perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja aparatur.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dalam pembangunan daerah.

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.

Sasaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya baik dalam jangka satu tahun ke depan atau Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memadukan prinsip *teknokratis, politis, bottom-up, top-down, serta partisipatif*.
2. Meningkatnya kinerja kelembagaan perencanaan daerah (Bappeda).
3. Menyusun data dan informasi untuk kepentingan perencanaan lintas bidang (seperti data : perencanaan pemb. Ekonomi, Keistimewaan dan SDM, Perencanaan Sarana dan Prasarana), serta data dan informasi lainnya yang dibutuhkan daerah secara makro.
4. Menyusun dokumen kajian/studi pembangunan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka perumusan arah kebijakan pembangunan
5. Meningkatnya koordinasi internal dan eksternal seluruh *stakeholder*.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan serta menyusun pelaporan capaian kinerja pembangunan.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan

pembangunan daerah dan membantu Bupati Pidie Jaya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pidie Jaya, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019 yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya Yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri Dengan Berlandaskan UUPA*” dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yaitu “*Menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan Perencanaan yang lebih berkualitas.*” maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tahun 2018 terdiri dari:

#### **A. Program Bappeda**

Program bappeda meliputi:

1. Program Perencanaan Tata Ruang;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sasana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Program Pengembangan Data/Informasi;
8. Program Kerjasama Pembangunan;
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

## B. Kegiatan Bappeda Tahun 2018

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2018			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		URUSAN WAJIB									
1	06	BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang			120.000.000	APBK		129.000.000		
1	06	15	20	Pengendalian Tata ruang	Jumlah pendampingan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	Pidie Jaya	100%	120.000.000	APBK	100%	129.000.000
1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			1.417.000.000	APBK		1.426.500.000
1	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional perkantoran	Pidie Jaya	12 bulan	6.000.000	APBK	12 bulan	6.500.000
1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik untuk operasional kantor	Pidie Jaya	12 bulan	240.000.000	APBK	12 bulan	250.000.000
1	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya keperluan jasa administrasi keuangan	Pidie Jaya	12 bulan	43.000.000	APBK	12 bulan	45.000.000
1	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai untuk operasional perkantoran	Pidie Jaya	12 bulan	110.000.000	APBK	12 bulan	115.000.000
1	06	01	11	Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Pidie Jaya	12 bulan	33.000.000	APBK	12 bulan	35.000.000
1	06	01	13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Pidie Jaya	12 bulan	120.000.000	APBK	12 bulan	80.000.000
1	06	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya referensi buku dan perundang-undangan	Pidie Jaya	12 bulan	10.000.000	APBK	12 bulan	10.000.000
1	06	01	17	Penyediaan makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur pemerintahan	Pidie Jaya	12 bulan	290.000.000	APBK	12 bulan	300.000.000
1	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Kolsultasi keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Pidie Jaya	12 bulan	280.000.000	APBK	12 bulan	300.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2018				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF			
1	06	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konksultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	Pidie Jaya	12 bulan	15.000.000	APBK		12 bulan	15.000.000
1	06	01	29	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Pidie Jaya	12 bulan	270.000.000	APBK		12 bulan	270.000.000
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			1.770.000.000	APBK			515.000.000
1	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya Perlengkapan gedung Kantor	Pidie Jaya	100%	1.605.000.000	APBK		100%	350.000.000
1	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	Pidie Jaya	100%	85.000.000	APBK		100%	85.000.000
1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Pidie Jaya	100%	80.000.000	APBK		100%	80.000.000
1	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya kedisiplinan pegawai			58.400.000	APBK			0
1	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai	Pidie Jaya	73 Orang	58.400.000	APBK		-	0
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	terpenuhinya kapasitas sumberdaya aparatur			35.000.000	APBK			35.000.000
1	06	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pidie Jaya	4 Kali	35.000.000	APBK		4 Kali	35.000.000
1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas			18.000.000	APBK			18.000.000
1	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P	Pidie Jaya	1 dok	18.000.000	APBK		1 dok	18.000.000
1	06	15		Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah data dan Informasi yang tersedia			541.350.000	APBK			541.350.000
1	06	15	06	Operasional Geografis Informasi Sistem (GIS)	Jumlah database spasial yang tersedia	Pidie Jaya	100%	165.000.000	APBK		100%	165.000.000
1	06	15	14	Operasional Pusat Data / Informasi (Pusdatin) Bappeda Kabupaten Pidie Jaya	jumlah data yang terkumpul pada pusat data bappeda	Pidie Jaya	100%	107.500.000	APBK		100%	107.500.000
1	06	15	16	Pengembangan Database Pembangunan Daerah	Jumlah buku pengembangan data base pembangunan daerah	Pidie Jaya	100%	170.000.000	APBK		100%	170.000.000
1	06	15	17	Publikasi Data / Informasi Pembangunan Daerah Melalui Teknologi Informasi	Jumlah publikasi pembangunan daerah melalui website	Pidie Jaya	100%	30.000.000	APBK		100%	30.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1 06 15 18	Publikasi Data Statistik Daerah	Jumlah data statistik daerah yang tersedia	Pidie Jaya	18 Dok	68.850.000	APBK		18 Dok	68.850.000
1 06 16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerja sama pembangunan yang terjalin			1.080.000.000	APBK			1.085.000.000
1 06 16 07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Khusus	Jumlah rapat koordinasi dana outsus/migas dengan SKPK/SKPA pengelola dana otonomi khusus yang dilaksanakan	Pidie Jaya	20%	50.000.000	APBK		20%	50.000.000
1 06 16 08	Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah (Pendamping / Pendukung Dana Dekonsentrasi dan TP)	Terciptanya pola percepatan pembangunan daerah	Pidie Jaya	20%	1.000.000.000	APBK		20%	1.000.000.000
1 06 16 12	Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional Manajemen	Jumlah koordinasi dan kerja sama dengan daerah kegiatan RM	Pidie Jaya	20%	30.000.000	APBK		20%	35.000.000
1 06 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Prosentase Aparatur yg dilatih, P3A yg dibina, Jumlah Kajian diBuat, dan penguatan PPSP/AMPL			1.020.000.000	APBK			470.000.000
1 06 20 02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan informasi perencanaan pembangunan daerah	Pidie Jaya	100%	44.000.000	APBK		100%	44.000.000
1 06 20 05	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Jumlah peserta P3A yang dibina	Pidie Jaya	20%	180.000.000	APBK		20%	180.000.000
1 06 20 06	Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Air Minum dan AMPL	terlaksananya percepatan sanitasi permukiman (PPSP) dan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	Pidie Jaya	20%	750.000.000	APBK		20%	200.000.000
1 06 20 07	Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi dan Informasi Aparat Perencana	Jumlah aparatur daerah yang dilatih menggunakan software ArcGIS	Pidie Jaya	1 kali	46.000.000	APBK		1 kali	46.000.000
1 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terencananya pembangunan daerah			3.008.800.000	APBK			2.508.800.000
1 06 21 08	Penyusunan RKPd	Jumlah buku dokumen RKPd yang tersedia	Pidie Jaya	1 dok	80.000.000	APBK		1 dok	80.000.000
1 06 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta yang dilaksanakan	Pidie Jaya	1 Kali	290.000.000	APBK		1 Kali	290.000.000
1 06 21 13	Monitoring; Evaluasi; Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	Jumlah buku Dokumen hasil monitoring pembangunan daerah	Pidie Jaya	3 Dok	185.000.000	APBK		6 Dok	185.000.000
1 06 21 14	Penyusunan RKT	Jumlah buku dokumen RKT yang tersedia	Pidie Jaya	1 dok	50.000.000	APBK		1 dok	50.000.000



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	06	21	15	Penyusunan KU-APBK	Jumlah buku dokumen KU-APBK yang tersedia	Pidie Jaya	1 dok	52.000.000	APBK		1 dok	52.000.000
1	06	21	17	Penyusunan PPAS	Jumlah buku dokumen PPAS yang tersedia	Pidie Jaya	1 dok	63.000.000	APBK		1 dok	63.000.000
1	06	21	19	Penyusunan PPAS Perubahan	Jumlah buku dokumen PPAS Perubahan yang tersedia	Pidie Jaya	1 dok	47.000.000	APBK		1 dok	47.000.000
1	06	21	20	Penyusunan KU-APBK Perubahan	Jumlah buku dokumen KU-APBK Perubahan yang tersedia	Pidie Jaya	1 dok	32.000.000	APBK		1 dok	32.000.000
1	06	21	21	Penyusunan Dokumen Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM)	Jumlah Dokumen RPIJMD yang dilakukan Riview	Pidie Jaya	1 dok	150.000.000	APBK		1 dok	150.000.000
1	06	21	28	Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	Prosentase Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	Pidie Jaya	1 dok	739.800.000	APBK		1 dok	1.039.800.000
1	06	21	29	Koordinasi transparansi dan percepatan realisasi anggaran	Jumlah laporan elektronik dan dokumen evaluasi serta pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah	Pidie Jaya	2 Dok	140.000.000	APBK		2 Dok	140.000.000
1	06	21		Revisi RPJMD Pidie Jaya	Jumlah dokumen hasil revisi RPJMD yang tersedia	Pidie Jaya	1 Dok	200.000.000	APBK		1 Dok	300.000.000
1	06	21		Penyusunan rancangan RKPDP Perubahan	Jumlah dokumen RKPDP Perubahan yang tersusun	Pidie Jaya	1 Dok	80.000.000	APBK		1 Dok	80.000.000
1	06	21		Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik	Tersedianya aplikasi e-planning untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	Pidie Jaya	1 Aplikasi	900.000.000	APBK		1 Aplikasi	-
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan ekonomi			753.000.000	APBK			753.000.000
1	06	22	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah RAD yang tersusun	Pidie Jaya	1 Dokumen	600.000.000	APBK		1 Dokumen	600.000.000
1	06	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Pertemuan koordinasi perencanaan pembangunan bidang	Pidie Jaya	20%	65.000.000	APBK		20%	65.000.000
1	06	22	12	Promosi Potensi Pembangunan Ekonomi daerah	Jumlah buku peluang investasi, Jumlah Brosur, Jumlah Poster	Pidie Jaya	1 kali	88.000.000	APBK		1 kali	88.000.000
1	06	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan KSDM			360.000.000	APBK			360.000.000
1	06	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Pidie Jaya	25%	165.000.000	APBK		25%	165.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2018				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIN	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF			
1	06	23	08	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah buku dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Pidie Jaya	25%	60.000.000	APBK		25%	60.000.000
1	06	23	12	Fasilitasi percepatan pembangunan gampong	Prosentase Fasilitasi Percepatan Pembangunan Gampong	Pidie Jaya	25%	100.000.000	APBK		25%	100.000.000
1	06	23	15	Pelaksanaan Program SDG's	Prosentase Efektifitas Koordinasi Pelaksanaan SDGS	Pidie Jaya	25%	35.000.000	APBK		25%	35.000.000
1	06	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan Sarana dan Prasarana			415.680.000	APBK			415.680.000
1	06	24	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya	Jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya yang dilaksanakan	Pidie Jaya	13%	100.000.000	APBK		13%	100.000.000
1	06	24	05	Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Pemanfaatan Lahan kritis menjadi lahan produktif	Pidie Jaya	13%	315.680.000	APBK		13%	315.680.000
JUMLAH TOTAL								10.579.230.000				8.239.330.000

Meureudu, Juni 2017

**Kepala Bappeda  
Kabupaten Pidie Jaya**

**Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670509 198902 1 001**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.